

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yaitu Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Kewenangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah ialah dengan desentralisasi kepada daerah untuk menyerahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengungkapkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat harus menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan memiliki peran dalam memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan

serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal. Menurut Mahmudi (2016:9):

Laporan keuangan sudah bersifat *general purposive* artinya, dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan.

Menurut Mahmudi (2016:9) “Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan”. Dalam rangka mengelola dana APBD yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Berdasarkan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan menjadi hal yang penting dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah. Menilai apakah pemerintah kabupaten/kota mampu mengelola keuangannya dengan baik atau tidak serta nantinya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan yang penting antarperkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Pada umumnya, rasio keuangan yang pada instansi pemerintah tidak dapat diukur dengan rasio yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan pada sektor publik ialah rasio efektivitas pendapatan asli daerah (efektivitas PAD). Rasio efektivitas PAD digunakan untuk membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan PAD.

Kinerja merupakan suatu pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. “Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas” (Mahmudi,

2016:89). Apabila pencapaian itu berhasil dilaksanakan maka kinerja dapat dikatakan berhasil. Jika pencapaian melebihi apa yang direncanakan maka kinerja dikatakan sangat baik. Namun sebaliknya, apabila pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan maka dapat dikatakan bahwa kinerja itu buruk. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud diantaranya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, sebagai pengalokasian sumber daya dan keputusan serta yang terakhir untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang disisi lain dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kualitas laporan keuangan daerah serta efektifitas ekonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam hal mengelola keuangan daerah yang nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini tabel rasio keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan tahun anggaran 2017.

Tabel 1.1
Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2017

No	Kabupaten/kota	Rasio Ketergantungan %	Rasio Efektivitas PAD %	Rasio Pertumbuhan		
				PAD %	Pendapatan %	Belanja %
1	Banyuasin	93,72	114,37	20,88	2,82	1,63
2	Empat lawang	92,28	90,51	12,79	207,89	11,40
3	Lahat	90,68	47,28	(11,07)	2,26	(8,82)
4	Muara Enim	77,80	80,87	2,26	2,40	22,27
5	Musi Banyuasin	88,67	92,38	23,90	0,09	2,65
6	Musi rawas	90,03	84,04	56,69	95,70	(22,12)
7	Musi Rawas Utara	92,41	96,94	78,96	(3,46)	(5,98)
8	Ogan Ilir	78,98	30,57	(12,80)	9,65	1,13
9	Ogan Komering Ilir	76,87	48,74	104,56	7,12	6,54
10	Ogan Komering Ulu	87,44	114,46	96,40	17,03	19,44
11	Ogan Komering Ulu Selatan	74,52	97,57	150,74	7,59	(2,50)
12	Ogan Komering Ulu Timur	75,24	105,50	12,03	5,10	0,33

13	Penukal Abab Lematang Ilir	93,84	64,11	116,06	23,06	16,43
14	Lubuk Linggau	87,03	78,74	52,40	2,56	7,50
15	Pagar Alam	91,93	98,87	28,22	(0,22)	(6,77)
16	Palembang	67,53	99,31	39,40	9,43	7,74
17	Prabumulih	86,50	92,25	38,18	(4,83)	(3,42)

Sumber: BPK RI 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2017 yang memiliki nilai rasio tertinggi adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 93,84% dan rasio terendah adalah Pemerintah Kota Palembang sebesar 67,53% namun masih kategori sangat tinggi karena rata-rata >50%. Kemudian tingkat efektivitas PAD yang sangat efektif Pemerintah Kabupaten/Kota yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan ialah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan persentase tertinggi sebesar 114,46%, ini berarti Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Banyuasin menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan. Kemudian untuk kategori tidak efektif (<75%) adalah Kabupaten Ogan Ilir dengan persentase terendah sebesar 30,57%. Kemudian untuk rasio pertumbuhan pendapatan yang mengalami penurunan tertinggi ialah Kota Prabumulih dengan persentase 4,83%. Rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2017 yang mengalami penurunan ialah Kabupaten Musi Rawas dengan persentase 22,12%.

Kepala kantor perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan Sudarso dalam pelatihan analisis laporan keuangan perpajakan angkatan II dan pelatihan bendahara pengeluaran APBN Angkatan IV di Balai Diklat Keuangan Palembang hari Senin, 17 September 2018 mengatakan “provinsi-provinsi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah Pusat” dan hanya ada satu pemerintah provinsi di Indonesia yang pendapatan asli daerahnya mencukupi untuk belanja daerah selama satu tahun. (<https://bppk.kemenkeu.go.id>). Ini berarti pemerintah daerah sangat bergantung kepada pendapatan transfer baik transfer pusat maupun provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah,**

Efektivitas PAD Dan Rasio Petumbuhan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi diantaranya:

1. Bagaimana rasio ketergantungan keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan?
2. Bagaimana rasio efektivitas PAD dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan?
3. Bagaimana rasio pertumbuhan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu laporan realisasi anggaran terdiri atas elemen pendapatan yaitu pendapatan transfer, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rasio ketergantungan keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui rasio efektivitas PAD untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang rasio keuangan pemerintah daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai masukan dan gambaran untuk pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
3. Bagi lembaga, sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.